

ANALISIS MODEL NORMATIF DEMOKRASI STRÖMBÄCK PADA PRAKTIK JURNALISME MEDIA ALTERNATIF “WATCHDOC DOCUMENTARY”

ANALYSIS OF STRÖMBÄCK'S NORMATIVE DEMOCRACY MODEL IN ALTERNATIVE MEDIA JOURNALISM PRACTICES “WATCHDOC DOCUMENTARY”

Yy Wima Riyayanatasya

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Contact: yywimar@unram.ac.id

ABSTRACT

Media and democracy are involved in a social contract, which has implications for one another. The emergence of alternative media is a breath of fresh air that provides an opportunity for the community to revive public space through public discussion and create a well-informed society regarding their rights in a democracy. Through literature review and digital observation, this paper attempts to describe the position of alternative media journalism practices based on Strömbäck's democratic normative model. WatchdoC Documentary as an alternative media implements a form of participatory democracy practice by using 'marginalized' sources, reaching out to issues that are rarely raised by the mainstream media, and placing citizens as active subjects and aware of the issues.

Keywords: *normative democracy model; journalism; alternative media; watchdoc documentary*

ABSTRAK

Media dan demokrasi terlibat dalam kontrak sosial, yang saling berimplikasi satu sama lainnya. Kemunculan media alternatif menjadi angin segar yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam menghidupkan kembali ruang publik dengan diskusi publik serta menciptakan masyarakat yang terinformasi baik terkait hak-hak mereka dalam demokrasi. Melalui pengkajian literatur dan observasi digital, tulisan ini berusaha menggambarkan posisi praktik jurnalisme media alternatif berdasarkan model normatif demokrasi Strömbäck. WatchdoC Documentary sebagai salah satu media alternatif melaksanakan bentuk praktik participatory democracy dengan menggunakan narasumber yang 'terpinggirkan', menjangkau isu yang jarang diangkat oleh media mainstream, dan menempatkan warga sebagai subyek aktif dan sadar terhadap isu yang ada.

Kata Kunci: model normatif demokrasi, jurnalisme, media alternatif, watchdoc documentary

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan media menjadi serba digital berimbas pada praktik jurnalisme. Terdapat tiga perubahan praktik jurnalisme sebagai reaksi media terhadap teknologi, yakni: perubahan konten; perubahan cara kerja jurnalis yang disesuaikan dengan karakteristik media *online*; serta siapapun dapat memproduksi berita dan informasi yang disebarluaskan (Supriyanto & Yusuf, 2007, h.108). Kebebasan informasi pada era digital seperti saat ini merupakan hadiah dari sistem politik demokrasi.

Media dan demokrasi telah terlibat dalam kontrak sosial. Strömbäck (2005, h.332) menyebutkan bahwa demokrasi dapat memenuhi kontrak sosial apabila menghargai dan melindungi kebebasan media. Sebagai negara demokrasi, penting untuk memberikan ruang dalam kebebasan pers dan informasi. Bagi jurnalisisme, pemenuhan kebutuhan informasi diharapkan dapat melahirkan diskusi publik terkait isu-isu politik serta menjalankan fungsi sebagai watchdog terhadap negara dan pemerintahan secara independen (Strömbäck, 2005, h. 332; Putra, 2004, h.137). Maka, kebebasan pers dapat memberikan ruang diskusi publik sebagai kebutuhan dasar dalam aktifitas institusional masyarakat (Siregar, 2000, h.173).

Faktanya, jurnalisisme profesional gagal melayani sistem demokrasi (Rianto, 2007, h.134). Kegagalan itu terlihat pada praktik jurnalisisme investigatif yang terhambat oleh kepentingan elit politik dan pergeseran praktik jurnalisisme ‘murah’ (Rianto, 2007, h.134). Selain itu, kegagalan ini menstimuli kemunculan beragam media baru, termasuk pada jurnalisisme publik (Rianto, 2007). Kemudian dalam artikelnya, yang berjudul ‘Kegagalan Jurnalisisme Profesional dan Kemunculan Jurnalisisme Publik’, Rianto menunjukkan bahwa kebutuhan demokrasi adalah partisipasi politik masyarakatnya. Partisipasi politik dapat dihadirkan dengan pemenuhan kebutuhan informasi sehingga masyarakat memiliki pengetahuan politik yang cukup (Rianto, 2007, h.143). Hal ini dapat terwujud melalui jurnalisisme publik.

Jurnalisisme publik merupakan satu bentuk jurnalisisme sebagai tanggung jawab media terhadap sistem politik demokrasi. Jurnalisisme publik mendedikasikan dirinya sebagai pelayan masyarakat dalam pemenuhan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, jurnalisisme publik bertanggungjawab untuk memberikan pengetahuan terkait isu-isu politik dan mencerdaskan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi mereka pada kegiatan politik. Sehingga tercipta masyarakat yang aktif dan memiliki keterikatan dalam semua aktifitas demokrasi di suatu negara, termasuk dalam diskusi publik terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

Jurnalisisme publik yang disebut sebagai pemenuhan kontrak sosial dengan sistem politik demokrasi tidak memberikan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya, kemunculan berbagai media alternatif menjadi angin segar yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam menghidupkan kembali ruang publik dengan diskusi-diskusi publik, serta menciptakan masyarakat yang terinformasi dengan baik terkait hak-hak mereka dalam demokrasi. Beberapa penelitian telah melihat hubungan antara praktik media alternatif dan *mainstream*, seperti cara media alternatif dapat memberikan ruang kepada orang-orang non elit untuk mewakili dan menunjukkan pengalaman mereka yang sering diabaikan oleh media *mainstream* (Atton, 2007; Edy & Snidow, 2011).

Media alternatif disebut mampu memberikan representasi isu dan peristiwa yang bertentangan dengan yang ditawarkan oleh media *mainstream*, serta mengadvokasi reformasi sosial dan politik (Haas, 2004). Selanjutnya, Atton dalam Haas (2004) menyebutkan bahwa media alternatif menjadi sebuah kritik terhadap media *mainstream* yang menawarkan nilai alternatif dan memiliki kerangka kerja sendiri untuk melaksanakan liputan berita mereka. Praktik jurnalisisme alternatif muncul dalam media *online* seperti “WatchdoC Documentary” yang memunculkan gaya baru jurnalisisme berupa film dokumenter di platform Youtube. WatchdoC Documentary

menyajikan beragam peristiwa dengan perspektif yang berbeda yang disajikan oleh media *mainstream*.

Berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya, sistem politik demokrasi berkaitan erat dengan model praktik jurnalisme, khususnya jurnalisme publik. Namun, Strömbäck (2005) menawarkan empat model demokrasi dan implikasi normatifnya terhadap bentuk-bentuk jurnalisme. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jurnalisme tidak hanya terbatas pada praktik jurnalisme publik dalam sistem politik demokrasi. Kemunculan media alternatif telah menjadi bukti adanya keterkaitan antara sistem politik demokrasi dan bentuk jurnalisme. Tulisan ini mencoba menelaah praktik jurnalisme media alternatif WatchdoC Documentary berdasarkan model normatif demokrasi yang ditawarkan oleh Strömbäck.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berguna untuk memahami makna dibalik data yang tampak dan mendapatkan pemahaman mendalam yang berkaitan dengan masalah manusia dan sosial (Sugiyono, 2018; Fadli, 2021). Penelitian ini menjabarkan tentang WatchdoC Documentary dan posisi praktik jurnalisme media alternatif.

Data penelitian bersumber dari pengkajian literatur, seperti jurnal ilmiah dan buku. Selain itu, penelitian ini menggunakan observasi digital untuk melihat konten film dokumenter karya WatchdoC Documentary melalui youtube. Peneliti memaparkan hasil penelitian secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

WatchdoC Documentary sebagai Media Alternatif

WatchdoC Documentary muncul pertama kali pada tahun 2009 dengan memanfaatkan platform *online* <http://watchdoc.co.id/>, dan mulai masuk pada platform Youtube pada tahun 2011. WatchdoC Documentary telah memproduksi 165 episode dokumenter, 715 *feature* televisi, dan 45 video komersial dan non komersial (WatchdoC, 2011). WatchdoC Documentary didirikan oleh Andhy Panca Kurniawan dan Dandhy Dwi Laksono, yang keduanya adalah aktivis media. Media ini menghadirkan gaya baru jurnalisme melalui produksi audio visual, dengan film dokumenter yang menampilkan beragam isu yang juga diangkat oleh media *mainstream*.

Beberapa isu yang diangkat oleh WatchdoC Documentary adalah isu pelemahan KPK, nasib pekerja migran selama pandemi, pertambangan batu bara dan pembangkit listrik tenaga uap, permasalahan reklamasi, agraria, pergusuran, kekeringan air, dan lain sebagainya. Misalnya saja, isu pelemahan KPK disajikan dalam judul ‘The Endgame’; nasib pekerja migran selama pandemi dikemas dalam judul ‘Undocumented’; dampak pertambangan batu bara dan pembangkit listrik tenaga uap terhadap masyarakat dan lingkungan digambarkan melalui ‘Sexy Killers’; permasalahan reklamasi Bali disajikan dengan film dokumenter bertajuk ‘Kala Benoa’; reklamasi Jakarta dihadirkan melalui film dokumenter berjudul ‘Rayuan Pulau Palsu’; isu pergusuran yang terjadi di Jakarta selama tahun 2015-2016 disajikan dengan judul ‘Jakarta Unfair’; isu agraria dihadirkan melalui film dokumenter dengan judul ‘Samin vs Semen’; isu terkait kekurangan air akibat pembangunan hotel di Yogyakarta dihadirkan melalui film dokumenter dengan judul

‘Belakang Hotel’. Isu-isu tersebut disajikan melalui film dokumenter yang menyajikan berbagai narasumber, baik para elit sebagai pemangku kepentingan dan juga korban terdampak. Isu-isu sosial diatas disajikan sebagai bentuk advokasi yang dilakukan oleh WatchdoC Documentary.

Berdasarkan beberapa hal diatas, WatchdoC Documentary dapat dikategorikan sebagai media alternatif. Media alternatif menantang praktik jurnalisme media *mainstream* dan memberikan perspektif yang didedikasikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan advokasi (Sen, 2017). Selain itu, WatchdoC Documentary memberikan ruang kepada orang-orang yang ‘terpinggirkan’ untuk bersuara dan menjadi narasumber. Tidak seperti pada media *mainstream* pada umumnya, yang cenderung menampilkan narasumber kaum elit dan mengesampingkan orang-orang yang terdampak beragam permasalahan. Sebagai contoh, kasus reklamasi Jakarta di beberapa media *online* menggunakan sudut pandang elit untuk menjabarkan permasalahan tersebut. Pada documenter lain, yakni The Endgame, WatchdoC Documentary menyoroti kesaksian para penyidik dalam upaya pelemahan KPK.

Praktik media *mainstream* cenderung meminggirkan sebagian besar aktor sosial untuk memberikan pandangan terhadap suatu kasus (Sen, 2017). Tempo.co sebagai saah satu media *online* yang menyajikan perkembangan kasus reklamasi Jakarta namun lebih banyak memakai sudut pandang elit. Beberapa berita yang dihadirkan oleh Tempo.co terkait bagaimana pendapat Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta menanggapi berbagai permasalahan yang muncul akibat reklamasi Jakarta. Hal ini dapat dibuktikan melalui beragam judul yang diangkat, seperti ‘Digugat Konsumen Pulau Reklamasi, Anies Baswedan: Mengenai Apa?’ (Hendartyo, 2018); ‘Gugatan Konsumen Reklamasi, Sandiaga Uno: Jangan Berspekulasi’ (Hasyim, 2018); ‘Anies Baswedan ke Perusahaan Reklamasi, Mau Jualan Izin Dulu’ (Putri, 2018); ‘Ternyata Anies Baswedan Tak Detailkan Stop Reklamasi di RPJMD’ (Putri, 2018); ‘Anies Baswedan Stop Reklamasi, PPP: Pelaksanaan Janji Pemimpin’ (Hasyim, 2018); dan sebagainya.

Tidak berbeda jauh dengan pemberitaan reklamasi Jakarta yang ditampilkan oleh Tempo.co, Kompas.com dan Republika Online juga melakukan hal yang sama. Dua media *online mainstream* ini pun menghadirkan sudut pandang elit dalam menjabarkan fenomena reklamasi Jakarta. Seperti Kompas.com menggunakan judul ‘Anies Baswedan: Reklamasi Teluk Jakarta Bukan Masalah Utama Ibu Kota’ (Nadlir, 2017). Sedangkan Republika Online menggunakan judul ‘Kepala BPN: Penghentian Reklamasi Kewenangan Pemprov DKI’ (Hermawan, 2018). Berdasarkan beberapa bukti diatas, menunjukkan bahwa ruang publik yang dikonseptualisasikan oleh Habermas tidak tercapai sebagai medium untuk mewujudkan jurnalisme dalam masyarakat demokratis.

Berbeda dengan media *mainstream* yang tidak menampilkan beragam narasumber secara berimbang, WatchdoC Documentary justru memberikan ruang kepada orang-orang yang terdampak reklamasi Jakarta, seperti nelayan, pengolah ikan asin dan pengurus kapal, pedagang, pejuang lingkungan. Bahkan WatchdoC Documentary juga memberikan ruang kepada pemangku kepentingan dan pemerintah, yakni Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahja Purnama sebagai narasumber.

Tidak hanya itu, advokasi WatchdoC Documentary terhadap isu-isu sosial melalui film dokumenter juga memberikan dampak yang besar terhadap aksi orang-orang yang selama ini tidak

diberi ruang oleh media *mainstream*. Kala Benoa, sebuah film yang dibuat WatchdoC Documentary untuk menggambarkan kondisi reklamasi Tanjung Benoa Bali. Film ini kemudian diputar di daerah yang terdampak oleh reklamasi Tanjung Benoa. Hal ini kemudian memunculkan diskusi publik hingga mendorong adanya aksi di setiap hari minggu, sebagai penolakan perusakan lingkungan berkedok reklamasi Tanjung Benoa. Film dokumenter karya WatchdoC Documentary lainnya, diputar melalui ruang publik terutama di daerah terdampak, kampus-kampus, komunitas, dan lainnya.

Pada praktiknya, WatchdoC Documentary telah mampu menghasilkan berita dan melakukan kolaborasi dengan dukungan publik. Hal ini kemudian yang menjadikannya sebagai media alternatif yang menentang beragam perspektif yang telah dihadirkan oleh media *mainstream*. Altarş dalam Sen (2017) menekankan bahwa media alternatif mengangkat suara masyarakat yang tidak terwakili di media *mainstream*. Selain itu, media *mainstream* tidak menganggap bahwa orang-orang yang terpinggirkan itu memiliki nilai berita yang menjual (Altarş dalam Sen, 2017). Sehingga media alternatif muncul untuk menghadirkan ruang publik dan memicu adanya diskusi publik sebagai ekspresi diri dan menetapkan posisi untuk menghadirkan nilai-nilai demokrasi.

Model Normatif Demokrasi dan Implikasinya terhadap Praktik Jurnalisme Strömbäck

Jesper Strömbäck (2005) dalam artikelnya yang berjudul “*In search of a standart: Four models of democracy and their normative implications for journalism*”, menawarkan empat model normatif demokrasi dan implikasinya terhadap praktik jurnalisme. Model ini lahir dilatarbelakangi oleh beragam penelitian menyebutkan bahwa ada media dan jurnalisme sering mendapatkan kritik karena konten yang diproduksi memberikan efek negatif pada beberapa aspek demokrasi (Strömbäck, 2005, h.331). Namun, disisi lain kritik tersebut tidak jelas standar demokrasi mana yang digunakan untuk mengkritik media dan jurnalisme (Strömbäck, 2005, h.331). Kritik terhadap media dan jurnalisme dipandang sangat penting untuk menyadarkan media dan jurnalisme agar menjalankan tanggung jawab demokrasi, untuk melayani setiap kebutuhan informasi warga.

Selanjutnya, Strömbäck (2005) mendeskripsikan tentang empat model normatif demokrasi dan ekspektasinya terhadap warga. Empat model normatif demokrasi tersebut adalah *procedural democracy*, *competitive democracy*, *participatory democracy*, dan *deliberative democracy*. Klaim dasar demokrasi prosedural menuntut pada warga dan politisi menghormati aturan dan prosedur demokrasi (Strömbäck, 2005, h.334). Hak untuk memilih, kebebasan berekspresi dan pers, dan persyaratan dasar lainnya, harus selalu dilindungi dan dihormati (Strömbäck, 2005, h.334).

Pada demokrasi kompetitif, menekankan pada pentingnya nilai pemilu (Strömbäck, 2005, h.334). Individu memiliki *power* dalam keputusan politik dengan perjuangan yang kompetitif untuk suara rakyat (Strömbäck, 2005, h.334). dalam model ini, elit bertindak dan warga beraksi. Selanjutnya adalah demokrasi partisipatoris menekankan adanya keterlibatan warga dalam kehidupan publik (Strömbäck, 2005, h. 336). Dalam model ini orang diharapkan untuk terlibat dalam kehidupan sipil dan publik. Pada tingkatan teratas, terdapat model demokrasi deliberatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam diskusi deliberatif (Strömbäck, 2005, h. 337).

Keempat model demokrasi diatas, ternyata memberikan implikasi terhadap praktik jurnalisme dan cara kerja media. Strömbäck (2005) menyebutkan bahwa selain mempengaruhi praktik jurnalisme dan cara kerja media, model demokrasi juga menentukan warga dan elit politik bertindak. Bila digambarkan secara sederhana, keempat model normatif demokrasi berada pada sebuah kontinum yang diletakkan secara berurutan mulai dari titik paling awal, yakni prosedural demokrasi, kompetitif demokrasi, partisipatif demokrasi, dan deliberatif demokrasi. Selanjutnya, praktik jurnalisme yang terjadi pada titik awal maka semakin elitis pemberitaan yang dilakukan. Semakin mendekati titik akhir, yakni deliberatif, semakin mengacu pada diskusi deliberatif masyarakat dalam ruang publik.

Dalam artikelnya, Strömbäck (2005) menegaskan bahwa kritik akan praktik jurnalisme yang tidak sesuai dengan demokrasi melalui pembagian model normatif demokrasi yang pada akhirnya berdampak pada praktik jurnalisme. Strömbäck (2005) membedakan dan menunjukkan tuntutan normatif apa saja yang diinginkan oleh jurnalisme berita pada masing-masing model normatif demokrasi. Pada model demokrasi prosedural, media dan jurnalisme bertindak sebagai pengawas yang mengungkap perbuatan yang menyimpang dari perilaku demokrasi (Strömbäck, 2005, h.341). Semua aktifitas media dan praktik jurnalisme akan menghormati prosedur demokratis yang sudah ada (Strömbäck, 2005, h.341).

Pada model demokrasi kompetitif, media dan jurnalisme bertindak sebagai pengawas dan berfokus pada sejarah para pejabat dan partai politik, serta aktor politik (Strömbäck, 2005, h.341). Di Indonesia sendiri, praktik media dan jurnalisme model inilah yang banyak digunakan, melihat beragam pemberitaan yang selalu berfokus pada elit-elit politik sesuai dengan pembahasan di sub bab sebelumnya.

Selanjutnya, pada model demokrasi ketiga, yakni partisipatif demokrasi memberikan ruang kepada warga untuk mengatur agendanya sendiri (Strömbäck, 2005, h.341). Media dan praktik jurnalisme dapat memobilisasi masyarakat serta menstimuli keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam kehidupan publik (Strömbäck, 2005, h.341). Dalam hal ini, warga negara memiliki kemampuan untuk peka terhadap isu sosial di sekitar mereka melalui bantuan media. Fokus utama jurnalisme dalam model ini adalah permasalahan itu sendiri dan pemecahan masalah yang dapat dimunculkan dengan memanfaatkan kepekaan dan keterlibatan aktif warga negara. Selain itu, jurnalisme menampilkan bingkai politik sebagai suatu proses yang utuh dan terbuka untuk semua orang dan warga sebagai subyek aktif yang dapat bertindak secara individu maupun kolektif (Strömbäck, 2005, h.341).

Pada tahapan paling akhir, jurnalisme model deliberatif demokrasi yang dianggap sebagai model yang paling baik diantara tiga model sebelumnya karena melibatkan warga negara dalam semua aktivitasnya. Media dan jurnalisme berita harus dapat menciptakan ruang publik dan menghadirkan diskusi-diskusi publik yang deliberatif (Strömbäck, 2005, h.341). Selain itu, tingkat mobilitas, keterlibatan, dan partisipasi warga negara dalam diskusi publik lebih kuat dibandingkan dengan model partisipatif (Strömbäck, 2005, h.341). Diskusi publik yang dimunculkan oleh media dan jurnalisme berita pada model demokrasi deliberatif ini dicirikan oleh rasionalitas, ketidakberpihakan, kejujuran intelektual dan kesetaraan (Strömbäck, 2005, h.341).

WatchdoC Documentary sebagai Bentuk Praktik Jurnalisme Model *Participatory Democracy*

Pada pembahasan sebelumnya, praktik jurnalisme yang dilakukan oleh WatchdoC Documentary telah dibedakan dengan praktik media *mainstream* pada umumnya. WatchdoC Documentary berusaha memunculkan perspektif baru dan menawarkan sisi lain yang tidak diungkap oleh media *mainstream*. Maka dari itu, penulis mengidentifikasi WatchdoC Documentary sebagai bentuk praktik jurnalisme media alternatif. Atton dan Hamilton dalam Sen (2017) menekankan bahwa media alternatif dicirikan oleh potensinya untuk partisipasi publik. Sejalan dengan model normatif demokrasi partisipatif yang ditawarkan oleh Strömbäck (2005, h.341), yang memberikan warga mengatur agenda. Media alternatif juga disebut sebagai media independen yang dapat mewakili warga tanpa adanya tekanan institusional media arus utama (Sen, 2017). Selain itu, model normatif demokrasi partisipatif dapat menciptakan keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam kehidupan publik (Strömbäck, 2005, h.341).

Salah satu bukti bahwa WatchdoC Documentary sebagai bentuk praktik jurnalisme model partisipatif demokrasi adalah bingkai politik yang disampaikan sebagai suatu proses yang terbuka untuk semua orang dan warga sebagai subyek aktif (Strömbäck, 2005, h.341). Hal ini ditunjukkan melalui pemilihan narasumber yang ‘terpinggirkan’ di setiap film dokumenter yang mereka buat. Selain itu, permasalahan yang tidak ter-*cover* oleh media *mainstream* juga ditampilkan. Misalnya, bagaimana jalannya diskusi antara warga terdampak masalah, para aktifis, dan pemangku kepentingan. Proses perseteruan antara aktor-aktor sosial juga dimunculkan dalam film-film dokumenter yang mereka produksi.

Film dokumenter yang diproduksi pada akhirnya menghidupkan warga sebagai subyek aktif. Tidak seperti di media *mainstream* yang menjadikan warga sebagai subyek pasif, karena semua pemberitaan berfokus pada elit-elit politik, ataupun pemangku kepentingan yang dianggap memiliki kewenangan penuh dalam menangani masalah. Warga tidak dilihat sebagai satu komponen penting dalam suatu permasalahan yang muncul. Dibandingkan dengan media *mainstream* sebagai alat yang digunakan oleh elit, organisasi dan institusi yang tersentralisasi, jurnalisme media alternatif menawarkan kemungkinan bagi individu dan kelompok untuk menciptakan media mereka sendiri (Sen, 2017).

Disamping itu, film-film dokumenter WatchdoC Documentary diputar di beberapa lokasi yang menjadi lokasi isu sosial sebagai upaya menghubungkan warga untuk aktif bersama. Hal ini kemudian menggambarkan praktik jurnalisme model partisipatif demokrasi karena melibatkan warga untuk ikut sadar dan menggiring isu bersama. Sebagai contoh, adanya pemutaran film ‘Kala Benoa’ yang diputar diseluruh banjar di daerah terdampak reklamasi Tanjung Benoa Bali. Hal ini memberikan dampak yang besar pada pergerakan masif dan kolektif warga yang secara aktif untuk menggiring isu lingkungan mereka sendiri. Bahkan pemutaran film tersebut dapat menciptakan suatu gerakan tolak reklamasi Tanjung Benoa yang secara rutin dilakukan setiap minggunya oleh ribuan masyarakat Bali. Sejalan dengan penjelasan (Strömbäck, 2005, h.341) bahwa praktik

jurnalisme model partisipatif demokrasi akan menghubungkan warga untuk bertindak secara aktif bersama.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa WatchdoC Documentary termasuk kedalam bentuk media alternatif yang menawarkan bentuk baru jurnalisme melalui produksi konten audio visual, seperti film dokumenter. Diantara keempat model normatif demokrasi yang telah dikonsepsikan oleh (Strömbäck, 2005), praktik jurnalisme WatchdoC Documentary cenderung kepada implikasi dari model normatif partisipatif demokrasi. Meskipun sebagai media alternatif, WatchdoC Documentary masih belum mampu menghadirkan ruang publik serta diskusi-diskusi publik yang melibatkan seluruh aktor sosial. Sehingga WatchdoC Documentary gagal mencapai tujuan deliberatif demokrasi yang menjadi satu bentuk praktik jurnalisme paling baik untuk menggambarkan makna demokrasi.

Konsepsi demokrasi yang menjadi sebuah pendekatan terhadap perbedaan praktik jurnalisme dan bentuk media berdampak pada pengkategorisasian model normatif yang didasarkan pada sistem politik dan sistem media yang ada. Sehingga empat model demokrasi dan implikasinya terhadap praktik jurnalisme yang ditawarkan oleh Strömbäck, merupakan cerminan dari sistem politik dan sistem media suatu negara atau kelembagaan/institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atton, C. (2007). Current issues in alternative media research. *Sociology Compass*, 1(1), 17-27. DOI: [10.1111/j.1751-9020.2007.00005.x](https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2007.00005.x)
- Edy, J. A. & Snidow, S. M. (2011). Making news necessary: How journalism resists alternative media's challenge. *Journal of Communication*, 61(5), 816-834.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54.
- Haas, T. (2004). Alternative media, public journalism, and the pursuit of democratization. *Journalism Studies*, 5(1), 115-121.
- Hasyim, I. (2018, 26 Februari). Gugatan Konsumen Reklamasi, Sandiaga Uno: Jangan Berspekulasi. *Tempo.co*. Diakses pada 29 Mei, 2018, dari <https://metro.tempoco/read/1064383/gugatan-konsumen-reklamasi-sandiaga-uno-jangan-berspekulasi>
- Hasyim, I. (2018, 3 April). Anies Baswedan Stop Reklamasi, PPP: Pelaksanaan Janji Pemimpin. *Tempo.co*. Diakses pada 29 Mei 2018, dari <https://metro.tempoco/read/1075728/anies-baswedan-stop-reklamasi-ppp-pelaksanaan-janji-pemimpin>
- Hendartyo, M. (2018, 23 Februari). Digugat Konsumen Pulau Reklamasi, Anies Baswedan: Mengenai Apa?. *Tempo.co*. Diakses pada 29 Mei, 2018, dari <https://metro.tempoco/read/1063647/digugat-konsumen-pulau-reklamasi-anies-baswedan-mengenai-apa>
- Hermawan, B. (2018, 4 April). Kepala BPN: Penghentian Reklamasi Kewenangan Pemprov DKI. *Republika Online*. Diakses pada 29 Mei, 2018, dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/04/04/p6nwg7354-kepala-bpn-penghentian-reklamasi-kewenangan-pemprov-dki>
- Nadlir, M. (2017, 26 Oktober). Anies Baswedan: Reklamasi Teluk Jakarta Bukan Masalah Utama Ibu Kota. *Kompas.com*. Diakses pada 29 Mei, 2018, dari

<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/26/19514441/anies-baswedan-reklamasi-teluk-jakarta-bukan-masalah-utama-ibu-kota>

Putra, I. G. N. (2004). Demokrasi dan kinerja pers Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 119-142.

Putri, B. U. (2018, 1 Maret). Anies Baswedan ke Perusahaan Reklamasi, Mau Jualan Izin Dulu. *Tempo.co*. Diakses pada 29 Mei 2018, dari <https://metro.tempo.co/read/1065589/anies-baswedan-ke-perusahaan-reklamasi-mau-jualan-urus-izin-dulu>

Putri, B. U. (2018, 2 April). Ternyata Anies Baswedan Tak Detailkan Stop Reklamasi di RPJMD. *Tempo.co*. Diakses pada 29 Mei 2018, dari <https://metro.tempo.co/read/1075614/ternyata-anies-baswedan-tak-detailkan-stop-reklamasi-di-rpjmd>

Rianto, P. (2007). Kegagalan jurnalisme profesional dan kemunculan jurnalisme publik. *Jurnal Komunikasi*, 1(2), 133-146.

Sen, A. F. (2017). Alternative journalism education in Turkey: A case study of the 'From School to Newsroom' (OHO) program. *Palgrave Communications*, 3.

Siregar, A. (2000). Media pers dan negara: Keluar dari hegemoni. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 171-196.

Strömbäck, J. (2005). In search of standart: Four models of democracy and their normative implications for journalism. *Journalism Studies*, 6(3), 331-345. DOI: 10.1080/14616700500131950.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Supriyanto, D. & Yusuf, I. A. (2007). Pers dan teknologi media: Dejournalisasi di tengah konvergensi media. *Jurnal Komunikasi*, 1(2), 97-110.